

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Echols, Jhon M. dan Hasan Sadly. 2004. *Kamus Inggris Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Ghalia
- Mahkamah Agung. 2023. *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Buku Panduan E-Court*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Sembiring, Dr. Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Soedharyo Soimin. 2001. *Hukum Orang dan Keluarga: Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti dan Tjoro Sudibhio. 1977. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an. 2014. *Penelitian Hukum (legal search)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,
Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 Yang
Telah Dicitak Ulang.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembar Negara Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 4843, Sekertariat Negara: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1039, Sekertariat Negara:
Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 894, Sekretariat Negara: Jakarta.

Jurnal

Berutu, L. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan E-Court". Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 5, No.1, 41-53, 2020.

Djarmiko, H. "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Jurnal Hukum Legalita, Vol.1, No. 1, 22-32, 2019.

Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. "Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan". Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No.2, 302-315, 2019.

Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)". Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No.1, 124-144, 2020.

Sari, N. P. R. K. “*Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*”. Jurnal Yustitia, Vol.13 No.1, 80-100, 2019.

Sundusiyah, S., & Hariyanto, E. “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan*”. Arena Hukum, Vol.15 No.3, 471-498, 2022.

Skripsi

Diansah, Moch Alfianto. (2023). “*Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo*”.

Mandovi, Nurfatim Yollandita. (2021). “*Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo*”.

Melani, Adinda Adira. (2022). “*Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Langsung*”.

Lain-Lain

Pn-lamongan .go.id, <https://www.pn-lamongan.go.id/> [Diakses, 24 November 2023].

SIPP PN Lamongan, <https://sipp.pn-lamongan.go.id/> [Diakses 12 Februari 2024].

Desi Islamianur, diwawancarai oleh Penulis. September 2023. Pengadilan
Negeri Lamongan, Kabupaten Lamongan.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H, diwawancarai oleh Penulis. Februari 2024.
Pengadilan Negeri Lamongan, Kabupaten Lamongan.